

## **BAB II**

### **DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI-QATAR**

Arab Saudi adalah sebuah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab dengan Riyadh sebagai ibukota dari negara ini. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang banyak berbatasan langsung dengan beberapa negara lain di sekitarnya, hal ini membuat hubungan diplomatik antar negara merupakan suatu fenomena yang wajar dan sangat perlu dibangun dalam dunia hubungan internasional. Arab Saudi tergabung aktif dalam beberapa institusi dan organisasi internasional serta negara ini juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangganya yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC), salah satunya adalah Qatar. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang politik luar negeri Arab Saudi serta dinamika hubungan Saudi-Qatar sejak tergabung ke dalam Dewan Kerjasama Teluk sampai putusnya hubungan diplomatiknya pada tahun 2017.

#### **A. Sistem Pemerintahan dan Dinamika Politik dalam Negeri Arab Saudi**

Arab Saudi merupakan sebuah negara dengan bentuk monarki absolut yang masih bertahan sampai saat ini di wilayah Timur Tengah dengan Raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Raja Saudi merupakan pengambil keputusan yang utama, di mana Raja mewakili semua kepentingan rakyatnya baik kepentingan dalam negeri maupun kepentingan luar negeri. Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar negaranya. Sedangkan Alqur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (*the constitution*) negara dan syari'ah merupakan hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari'ah, di

mana ulama-ulama berperan sebagai hakim dan penasehat-penasehat.

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, itu bukan berarti bahwa tidak ada undang-undang di bawahnya. Secara hirarki, setelah kedua dasar hukum itu yang ditetapkan pada tahun 1992, adalah *Basic Law of Government* yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara.<sup>1</sup> Hukum dasar pemerintahan Arab Saudi yang mengatur sistem pemerintahan negara diantaranya ada beberapa pasal disebutkan seperti, Pasal 17 *Basic Law* (27-8-1412 H/1-3-1992 M) menetapkan bahwa kepemilikan, modal, tenaga kerja adalah dasar ekonomi dan kehidupan social kerajaan, semua ini adalah hak-hak pribadi yang melayani fungsi sosial yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>2</sup>

Ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum, yaitu mahkamah syari'ah dan lembaga fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda, di mana Mahkamah Syari'ah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Mahkamah syari'ah memeriksa perkara pidana (jinayah) perkara perdata (muamalah) dan wilayah yurisdiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya.

Dengan adanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang menjadi Undang-undang Dasar di negara ini, oleh sebab itu semua aspek hukum yang menyangkut dengan hukum had

---

<sup>1</sup><http://www.kemlu.go.id/riyadh/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=1&l=id>.

<sup>2</sup>Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia,  
<http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutKingDom/SaudiGovernment/Pages/BasicSystemOfGovernance35297.aspx>. Diakses pada 26 Oktober 2018.

atau kisas serta hukum takzir dapat diterapkan bagi warga-warga yang melanggar norma yang telah ditetapkan. Jika ada warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan membunuh dengan ataupun tanpa alasan hukum syari'ah, maka sanksi hukumnya adalah dibunuh. Seperti itu juga dengan orang-orang yang melakukan zina maka akan terkena hukum rajam. Dan jika ada warga yang melaporkan perbuatan zina tersebut tanpa bukti dari empat orang saksi, maka akan dikenakan hukuman rajam sebanyak delapan puluh kali dan kemudian akan diisolasi atau diasingkan dari tempat kediamannya. Begitu juga dengan pelaku-pelaku pidana konisitas maupun kelompok-kelompok pengacau keamanan layaknya perampokan serta pembunuhan dikenakan sanksi berupa pidana salib, yaitu sebagai suatu hukuman dengan amputasi silang dua organ tubuh tangan kiri dan kaki kanan.

Jika pada saat memeriksa suatu perkara dan kemudian tidak ditemukan dasar-dasar hukum yang ada pada *Basic Law of Government*, Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah, maka hakim-hakim di Mahkamah Syari'ah diberikan kebebasan untuk berijtihad. Ijtihad merupakan suatu upaya dari segala kemampuan pemikiran yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam upaya menggali ataupun untuk mendapatkan hukum yang tidak diperoleh di dalam Alqur'an maupun Sunnah Rasulullah. Ijtihad hakim diperoleh berdasarkan atas keputusan dari hakim terhadap suatu perkara yang sebelumnya dengan sifat serta krakteristik perkara yang sama, ataupun dengan menggunakan hasil pemikiran dari para ulama hukum Islam klasik. Seperti penerapan hukum Islam di dunia Islam lainnya, bahkan keputusan hakim mahkamah syari'ah sebagai presiden bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mempunyai sifat maupun karakteristik yang sama.

Sistem maupun struktur politik dalam perkembangannya pada kerajaan Arab Saudi, mengalami perubahan di mana kerajaan Arab Saudi ini sebelumnya menganut bentuk sistem kekuasaan yang didominasi oleh unsur keagamaan dan bercirikan kepada kekuasaan tradisional primitif yang sampai sekarang masih dikaitkan dengan adat istiadat menjadi monarki absolut. Di era perubahan sosial seperti pendidikan dan ekonomi yang cukup pesat ini, kerajaan dari negara Arab Saudi ini tetap mempertahankan politik tradisional dan otoritas keagamaannya. Aktifitas politik Arab Saudi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Raja dibantu oleh dewan menteri untuk mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Majelis Syura yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Raja adalah sebagai lembaga legislatif. Walaupun demikian, kekuasaan Raja Arab Saudi itu bukan tanpa batas, tetapi tetap juga seperti dalam teori dimana Raja tetap harus tunduk kepada hukum (syari'ah), dan jika Raja melanggar syari'ah (hukum Ilahi), maka ini merupakan alasan yang kuat untuk menurunkan Raja dari jabatannya.

Monarki mutlak adalah merupakan sebuah institusi pusat pada pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Dimana, Undang-Undang Asas yang digunakan oleh kerajaan ini dari tahun 1992, menyatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi merupakan satu kerajaan yang diperintah oleh garis keturunan dari Raja Abdul Aziz Al-Saud, serta Alqur'an menjadi sebuah perlembagaan kerajaan Arab Saudi yang diperintah untuk mengikuti undang-undang Islam (Syari'ah). Di Arab Saudi, pembentukan partai tidak diperbolehkan serta pemilihan umum dilarang di negara itu, maka dari itu pengangkatan Raja didasarkan pada keturunan Raja-raja sebelumnya. Pada aturan pergantian raja di Arab, Raja akan digantikan apabila Raja pemegang tahta telah wafat. Berdasarkan sejarah kerajaan, baru satu kali terjadi penggulingan kekuasaan. Biasanya Putra Mahkota yang telah

dipersiapkan sebelumnya akan naik menggantikan raja yang telah wafat. Namun, ada juga raja yang menunjuk wakil putra mahkota sebagai pengganti dari dirinya. Berikut daftar raja-raja yang pernah memimpin Arab Saudi:

Raja pertama yaitu, Abdul Aziz ibnu Saud dilahirkan di Riyadh pada bulan November 1880 dan wafat pada tahun 1953. Raja Abdul Aziz memerintah Kerajaan Arab Saudi mulai dari 22 September 1932 sampai pada 9 November 1953. Ibn Saud ini dalam membangun kerajaan Arab Saudi pada saat itu dilakukan dengan berlandaskan pada Syariah Islam. Di mana, Raja Arab Saudi yang pertama ini berhasil dalam mengubah kerajannya menjadi sebuah negara Islam yang modern dan kaya dengan tradisi budayanya. Raja pertama dari kerajaan ini juga dikenang sebagai seorang negarawan besar yang tentunya ahli akan hal politik serta menguasai cara untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai pemenuhan kepentingan rakyatnya.

Raja kedua yaitu, Saud bin Abdul Aziz yang lahir pada 12 Januari 1902 dan wafat pada 23 Februari 1969. Beliau adalah Raja Arab Saudi yang memerintah pada tahun 1953 sampai 2 November 1964. Selama masa pemerintahannya, beliau mendirikan beberapa kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Pendidikan serta Kementerian Kesehatan. Beliau merupakan anak tertua dari Ibn Saud dan dikenal sebagai raja yang senang menghabiskan uang. Anak-anak dari Raja Saud ini juga diberikan jabatan tinggi dalam pemerintahannya. Hal ini membuat Raja Saud digulingkan oleh anggota keluarganya sendiri. Dan kemudian Faisal bin Abdul Aziz yang merupakan adik dari Raja Saud pun akhirnya menggantikan posisi dari Raja Saud.

Raja ketiga yaitu Raja Faisal bin Abdul Aziz yang lahir di Riyadh pada tahun 1906 dan akhirnya wafat pada 1975. Awal pemerintahan Raja Faisal ini dimulai pada

tahun 1964 dan kemudian berakhir setelah dia wafat. Selepas skandal keuangan Raja Saud, Pangeran Faisal dilantik menjadi pemerintah sementara. Pada tanggal 2 November 1964, ia dilantik menjadi raja yang melakukan banyak reformasi. Raja Faisal dikenal sebagai seorang pemimpin yang penuh inovasi dan beliau juga seorang raja yang saleh serta sangat memerhatikan kesejahteraan setiap warganya dan sangat menjunjung tinggi atas program penghapusan perbudakan di negara tersebut. Bahkan, Raja Faisal membeli seluruh budak yang ada di negaranya dengan uang pribadinya sampai tidak ada satu budak pun di kerajaan tersebut. Kemudian, budak yang dibelinya tersebut dibebaskan dan Raja Faisal pun mengambil kebijakan untuk memberlakukan larangan perbudakan di negaranya.

Raja keempat yaitu Raja Khalid bin Abdul Aziz, dimana beliau memerintah kerajaan Arab Saudi pada 1975 sampai dengan 1982. Raja Khalid kemudian menggantikan posisi Raja Faisal setelah Raja Faisal wafat. Sebelum menjadi Raja Kerajaan Arab Saudi, beliau menjabat sebagai Gubernur Hijaz di tahun 1932 dan beliau juga pernah menjabat Menteri Dalam Negeri pada tahun 1934. Dalam kepemimpinannya, Raja Khalid banyak membuat beberapa kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Raja Khalid berhasil memperbaharui persenjataan kerajaan pada tahun 1982 serta mendatangkan 16 pesawat tempur dari Amerika. Dan pada tahun 1982 juga beliau wafat karena mengalami serangan jantung.

Raja kelima yaitu Raja Fahd bin Abdul Aziz, beliau lahir pada tahun 1921 di Riyadh. Raja Fahd pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan dilantik pada 1953. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 1962. Kemudian, setelah Raja Khalid wafat Raja Fahd menggantikan Raja Khalid pada Juni 1982. Raja Fahd banyak berkontribusi pada bidang diplomasi internasional di Kerajaan

Arab Saudi. Raja Fahd mampu membuat ekonomi Arab Saudi mengalami peningkatan. Dan pada 1995 beliau wafat karena terserang stroke.

Raja keenam yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Raja Abdullah lahir pada tahun 1924 di Riyadh. Pada tahun 2005 beliau menjabat sebagai Raja dari Kerajaan Arab Saudi, dimana sebelumnya beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sholeh dan rendah hati serta banyak memiliki pengalaman untuk memberikan pengaruh besar pada kerajaan ketika masih menjadi Putera Mahkota di masa Raja Fahd. Raja Abdullah sudah mewakili peran dari Raja Fahd pada tahun 1995 yang terserang stroke. Raja Abdullah membuat banyak kebijakan yang menjadikan kerajaan Arab Saudi dikenal dan disegani di dunia internasional pada masa kepemimpinannya. Raja Abdullah dikenal sebagai raja yang sangat memerhatikan hak asasi manusia. Pada akhirnya, beliau wafat karena penyakit yang dideritanya pada Jum'at, 23 Januari 2015.

Raja ketujuh yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, beliau lahir pada tahun 1935. Raja Salman berhasil membawa Arab Saudi menjelma menjadi kota kosmopolitan dengan jumlah penduduk yang awalnya hanya memiliki 200 ribu kini menjadi lebih dari 7 juta penduduk. Kerajaan Arab Saudi kini menjadi tempat bernaung bagi puluhan perguruan tinggi yang berkualitas tinggi.<sup>3</sup> Raja Salman pernah menjabat sebagai wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur Riyadh selama 48 tahun, yaitu dari tahun 1963 sampai 2011. Beliau sebelumnya juga pernah menjabat sebagai

---

<sup>3</sup>Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, <http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutKingDom/SaudiGovernment/Pages/BasicSystemOfGovernance35297.aspx>. Diakses pada 26 Oktober 2018.

Menteri Pertahanan dan banyak berkontribusi untuk negaranya di masa Raja Abdullah.<sup>4</sup>

## **B. Politik Luar Negeri Arab Saudi**

Arab Saudi sebagai negara monarki tidak menutup hubungan dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Arab Saudi membangun hubungan baik dengan negara lain terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah sebagai bentuk penerapan politik luar negeri yang di terapkan oleh Arab Saudi itu sendiri. Dalam menjalin hubungan luar negerinya, Arab Saudi aktif dalam organisasi antar Negara Timur Tengah yang bernama Liga Arab. Dimana, Arab Saudi merupakan salah satu negara pendiri dari organisasi tersebut.

Dengan mendirikan Liga Arab bersama Mesir, Irak, Yordania, Libanon, Suriah dan Yaman, Arab Saudi berusaha menanamkan pengaruh politiknya terhadap Negara-negara di wilayah Timur Tengah. Beberapa konferensi yang telah dilakukan oleh negara-negara yang tergabung ke dalam Liga Arab yaitu, Kairo: 13-17 Januari 1964, Alexandria: 5-11 September 1964, Casablanca: 13-17 September 1965, Khartoum: 29 Agustus 1967, Rabat: 21-23 Desember 1969, Kairo (konferensi darurat pertama): 21-27 September 1970, Aljir: 26-28 November 1973, Rabat: 29 Oktober 1974, Riyadh (konferensi darurat kedua): 17-28 Oktober 1976, Kairo: 25-26 Oktober 1976, Baghdad: 2-5 November 1978.<sup>5</sup>

Dengan bergabungnya Arab Saudi dalam Liga Arab, membuktikan bahwa Arab Saudi ingin menjalin hubungan baik dengan negara-negara di wilayah Timur Tengah. Liga Arab akan menjadi wadah yang tepat bagi Saudi untuk

---

<sup>4</sup> Ibid, diakses pada 26 Oktober 2018

<sup>5</sup> [http://www.arableagueonline.org/charter-arab-league/?art\\_id=853&level\\_id=11](http://www.arableagueonline.org/charter-arab-league/?art_id=853&level_id=11)



menarapkan kebijakan-kebijakannya yang tentunya menguntungkan bagi Arab Saudi itu sendiri. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Arab Saudi tidak hanya bergabung dengan Liga Arab, namun Arab Saudi juga berusaha menanamkan pengaruhnya untuk tetap mempertahankan eksistensinya di kawasan Timur Tengah dengan bergabung ke dalam GCC (*Gulf Cooperation Council*) yang bermarkas di Riyadh yang beranggotakan enam negara di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, atar, Bahrain dan Oman dan dibentuk pada Mei 1981. GCC atau Dewan Kerjasama Teluk merupakan salah satu organisasi regional yang sangat penting di kawasan Timur Tengah.<sup>6</sup>

Sistem politik dan ekonomi antar anggota GCC ini hampir sama dan mempunyai kepentingan bersama di bidang politik, ekonomi, diplomatik dan militer. GCC berasas tujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dan pengintegrasian di berbagai bidang, mengintensifkan hubungan, pertukaran dan kerja sama antar berbagai anggota, mendorong industri, pertanian, ilmu pengetahuan, membentuk pusat penelitian ilmiah, membangun projek bersama serta mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan antar perusahaan swasta.<sup>7</sup>

Pelebaran politik luar negeri Arab Saudi ini menunjukkan bahwa Saudi membuka pintu lebar-lebar bagi negara-negara yang ingin menjalin kerja sama dengan negaranya dan dengan catatan kerja sama tersebut menguntungkan bagi Arab Saudi sendiri.

### **C. Politik Luar Negeri Arab Saudi-Qatar**

Saudi dan Qatar merupakan dua negara yang sama-sama memiliki pengaruh di wilayah Jazirah Arab. Dua negara

---

<sup>6</sup><http://www.gcc-sg.org/>

<sup>7</sup> Ibid

ini terletak di kawasan Teluk Persia dan tergabung ke dalam organisasi regional yaitu Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council*) GCC, yang dibentuk pada 25 Mei 1981, guna untuk meningkatkan kerjasama diberbagai bidang seperti agama, keuangan, keamanan, pertahanan, perdagangan, bea cukai, pariwisata, legislasi, dan administrasi. Hubungan Saudi dan Qatar berjalan cukup baik sejak tergabung ke dalam *Gulf Cooperation Council*.

### **1. Sejarah Singkat Berdirinya *Gulf Cooperation Council***

*Gulf Cooperation Council* (GCC) mulai dibentuk sebagai langkah awal kekhawatiran Negara-negara anggota Kawasan Teluk atas ancaman negara Iran yang ada di kawasan Teluk Persia. Iran dinilai sebagai ancaman oleh beberapa negara-negara Arab dan mereka khawatir akan luasnya pengaruh dari revolusi Iran serta kemungkinan dari kemenangan Iran pada Perang Teluk pertama atau yang disebut dengan Perang Iran-Irak tahun 1980-1988. GCC dibentuk sebagai aliansi dari negara-negara yang anti demokrasi dan berusaha membendung kekuatan Syiah Iran. GCC sendiri dibentuk pada 25 Mei 1981 dan bermarkas besar di Riyadh. GCC merupakan sebuah aliansi politik dan ekonomi enam negara Timur Tengah yaitu Oman, Bahrain, UEA, Qatar, Arab Saudi dan Kuwait. GCC dibentuk atas tujuan dasar untuk saling memiliki koordinasi, integrasi dan inter-koneksi antara negara anggota di semua bidang seperti ekonomi, perdagangan, pariwisata, bea cukai, legislasi dan administrasi.

Aliansi politik dari Negara-negara Teluk ini didirikan atas dasar sistem politik yang sama antar negara anggota, pandangan hubungan khusus, dan juga didirikan atas dasar keyakinan yang sama yaitu Islam serta takdir bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Disamping kedekatan

geografis, penerapan umum kebijakan ekonomi perdagangan bebas dalam rangka membentuk pasar umum regional juga merupakan faktor lain yang mendorong terbentuknya organisasi ini.<sup>8</sup>

## **1.1 Struktur Organisasi *Gulf Cooperation Council (GCC)***

### **Dewan Tertinggi**

Dewan Tertinggi Dewan Kerjasama Teluk (GCC) merupakan sebuah otoritas yang paling tinggi di organisasi dan Dewan Tertinggi ini terdiri dari setiap kepala-kepala negara Dewan Kerjasama Teluk. Dewan tertinggi bertugas untuk menetapkan visi dan tujuan dari Dewan Kerjasama Teluk. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Resolusi dalam hal-hal substantif dilakukan dengan persetujuan bulat dari negara anggota yang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Namun, keputusan tentang hal-hal prosedural diambil oleh pemungutan suara mayoritas Dewan Tertinggi.<sup>9</sup>

### **Dewan Menteri**

Pada Dewan Menteri ini terdiri dari para Menteri Luar Negeri dari setiap negara anggota atau menteri lain yang mewakili mereka. Setiap 3 bulan sekali, Dewan Menteri selalu mengadakan pertemuan untuk membuat rekomendasi dan merumuskan kebijakan untuk promosi kerja sama di antara Negara-negara anggota dan mencapai koordinasi di antara Negara-negara anggota untuk pelaksanaan proyek yang sedang berjalan. Dewan Menteri ini menyerahkan

---

<sup>8</sup> GlobalSecurity, Op.Cit

<sup>9</sup> Secretariat General of The Gulf Cooperation Council, <http://www.gcc-sg.org/en-us/Pages/default.aspx> diakses pada 9 November 2018

keputusannya dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Tertinggi untuk persetujuannya. Dewan Menteri juga bertanggung jawab dalam hal persiapan untuk mengadakan pertemuan Dewan Agung dan mempersiapkan agendanya.<sup>10</sup>

### **Sekretariat jenderal**

Sekretariat jenderal merupakan sebuah badan eksekutif dari *Gulf Cooperation Council* dengan tujuan pengambilan keputusan pada otoritas dan mengimplementasikan keputusan yang telah disetujui tersebut oleh Agung ataupun Dewan Menteri. Sekretariat Jenderal berfungsi untuk mempersiapkan studi khusus yang berkaitan dengan kerja sama, koordinasi, perencanaan dan pemrograman untuk aksi bersama, persiapan laporan berkala mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh GCC, menindaklanjuti pelaksanaan keputusannya sendiri, persiapan laporan dan mempelajari tentang permintaan baik Dewan Tertinggi atau Dewan Menteri, finalisasi agenda mereka dan menyusun resolusi.<sup>11</sup>

## **2. Hubungan Diplomatik Saudi-Qatar Melalui GCC**

Dalam menghadapi tantangan keamanan di lingkungan regional, negara-negara GCC menerapkan kebijakan mengenai koordinasi mobilitas keamanan. Negara-negara Teluk Persia yang tergabung ke dalam organisasi regional ini kecuali Irak, merasa adanya ancaman atau tantangan dalam hal akan keamanan kawasan yang terfokus pada isu terorisme sejak terjadinya peristiwa *Arab Spring*. Dimana, kelompok ekstrimis yang dianggap sebagai teroris oleh beberapa negara anggota *Gulf Cooperation Council* dinilai akan mengganggu stabilitas keamanan kawasan Teluk setelah terjadinya peristiwa *Arab Spring* tersebut.

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

Berbicara akan stabilitas keamanan kawasan, Arab Saudi dan Qatar pernah berkomitmen dalam bidang keamanan kawasan melalui sebuah perjanjian keamanan yang dikenal dengan “Perjanjian Riyadh” pada 23 November 2013. Dokumen perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Abdullah bin Abdulaziz yang merupakan Raja Arab Saudi pada saat itu, dan Emir Qatar yaitu, Tamim bin Hamad Al Thani. Perjanjian ini juga ikut ditandatangani oleh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah sebagai Emir Kuwait.

Dalam dokumen pertama perjanjian ini, menjabarkan komitmen untuk menghindari setiap intervensi urusan internal negara lain, termasuk melarang dukungan finansial maupun politik untuk kelompok-kelompok menyimpang. Perjanjian Riyadh ini secara spesifik menyebut larangan mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok oposisi di Yaman yang mengancam kawasan.<sup>12</sup>

Kemudian, dokumen kedua ikut ditandatangani oleh seluruh negara anggota GCC pada 16 November 2014 yang diberi kop “*Top Secret*”. Dokumen kedua ini menjelaskan para pihak yang ikut menandatangani perjanjian untuk mendukung stabilitas Mesir dan menjaga stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah dengan tidak mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin serta mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai sarana oleh beberapa tokoh atau kelompok-kelompok yang mengadakan perlawanan menentang otoritas Mesir.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> DetikNews, *Qatar dan Arab Saudi Cs Pernah Tandatangani Perjanjian Rahasia*, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-3556253/qatar-dan-arab-saudi-cs-pernah-tandatangani-perjanjian-rahasia> pada 10 November 2018

<sup>13</sup> Ibid

#### **D. Panas Dingin Hubungan Arab Saudi dan Qatar**

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar ini sudah berlangsung sejak lama. Dalam menjalin hubungan diplomatiknya, Saudi dan Qatar ini diwarnai dengan intensitas hubungan yang naik turun. Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan panas dingin hubungan bilateral Arab Saudi dan Qatar yang dimulai dari tahun 2013 dan sampai akhirnya Saudi mengambil sebuah kebijakan untuk memboikot Qatar dengan memutuskan hubungan diplomatik.

Pada Juli 2013, kedua negara tersebut terlibat konflik bilateral dikarenakan kebijakan Qatar yang menerima eksil Ikhwanul Muslimin yang diusir militer Mesir. Kejadian ini bermula pasca kudeta yang terjadi di Mesir pada tahun 2013 lalu. Pada saat itu, mantan presiden Mesir Mohamed Morsi yang merupakan pemimpin Ikhwanul Muslimin digulingkan pada tahun 2013. Setelah kejadian ini, Qatar menyediakan suatu platform untuk para anggota kelompok yang dilarang oleh pemerintah Mesir itu. Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab menyebut bahwa Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris yang dapat membahayakan stabilitas keamanan kawasan Teluk ataupun Timur Tengah. Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di lembaga pemberitaan Saudi, SPA, Qatar dituduh mendukung berbagai kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah tersebut, termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin.<sup>14</sup>

Kedua negara ini kembali terlibat konflik bilateral yang disebabkan oleh adanya kedekatan Qatar dan Iran pada hubungan kerjasama ekonomi bidang produksi minyak bumi dan gas alam meningkat pada Januari 2014. Qatar dan Iran

---

<sup>14</sup> BBC, "*Krisis Qatar: Empat faktor kejengkelan tetangga Arab*", BBC 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40169036>, 10 November 2018

merupakan pemegang cadangan gas alam terbesar kedua dan ketiga di dunia setelah Rusia. Kedua negara ini memiliki hubungan yang cukup erat dalam bidang ekonomi. Dimana, Qatar dan Iran memiliki ladang gas bumi bersama yang merupakan ladang gas alam terbesar di dunia.

Ladang gas bumi bersama di bawah perairan Teluk Persia ini disebut Pars Selatan (*South Pars*) oleh Iran dan Lapangan Utara (*North Field*) oleh Qatar. Ini menyumbang hampir semua produksi gas Qatar dan sekitar 60 persen dari pendapatan eksportnya.<sup>15</sup> Qatar mengatakan pihaknya berniat ingin membantu Iran mengembangkan wilayah olahan dari sisi *South Pars*, sehingga kedua negara dapat memetik hasil maksimal jangka panjang. Qatar menawarkan dukungannya sebagai tanggapan atas permintaan dari Iran, yang telah menandakan keinginannya untuk menjadi lebih terbuka dan kooperatif sejak Presiden Rohani mulai berkuasa.<sup>16</sup>

Hal ini ternyata membuat Arab Saudi merasa jengkel dan dengki atas meningkatnya hubungan Qatar dengan Iran. Dimana, Iran merupakan musuh utama Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Atas dasar ini, Arab Saudi menarik kembali duta besarnya dari Qatar yang diikuti oleh Bahrain dan Uni Emirat Arab pada 5 Maret 2014. Saudi dan dua sekutunya di Timur Tengah tersebut menarik duta besarnya dari Qatar dengan alasan yang disebut campur tangan atas urusan dalam negeri mereka.

Ketiga negara ini menyebut Qatar telah gagal menerapkan kesepakatan yang telah disepakati dalam bidang keamanan dan telah ditandatangani dengan isi tentang

---

<sup>15</sup> Iran-Times, *Qatar Offers to Help Iran get out its Gas*, diakses dari <http://iran-times.com/qatar-offers-to-help-iran-get-out-its-gas/> pada 11 November 2018

<sup>16</sup> Ibid

komitmen negara-negara Arab dengan tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara termasuk pula tidak mendukung media yang mendukung beberapa kelompok teroris. Qatar dinilai telah mendanai stasiun TV besar di Qatar yaitu Al-Jazeera, yang peliputannya selama ini di dunia Arab dipandang dengan penuh kecurigaan oleh Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Media ini juga dituduh sangat dekat dengan kelompok teroris seperti halnya Ikhwanul Muslimin yang selama ini dipandang oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai ancaman dalam hal keamanan di kawasan.<sup>17</sup>

Para menteri luar negeri negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* telah mengadakan pertemuan yang berlangsung di Riyadh untuk mencoba membujuk Qatar untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Negara-negara anggota GCC telah meminta Qatar menyepakati satu kebijakan bersatu guna menjamin tidak melakukan campur tangan secara langsung maupun tidak langsung, atas urusan dalam negeri setiap anggota dan tidak mendukung satu pihak yang bertujuan untuk mengancam keamanan dan stabilitas setiap anggota GCC namun gagal.<sup>18</sup> Pada hasil pertemuan tersebut, ketiga negara akhirnya memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Qatar.

---

<sup>17</sup> BBC, "Tiga Negara Teluk Tarik Duta Besar dari Qatar", diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140305\\_arab\\_dip\\_lomasi](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140305_arab_dip_lomasi) pada 11 November 2018

<sup>18</sup> Gulf News Government, "UAE, Saudi Arabia and Bahrain recall their ambassadors from Qatar" diakses dari <https://gulfnews.com/uae/government/uae-saudi-arabia-and-bahrain-recall-their-ambassadors-from-qatar-1.1299586#> pada 11 November 2018



Dari banyak kejadian yang akhirnya membuat Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dan menarik duta besarnya dari Qatar serta beberapa negara sekutunya yang tergabung ke dalam Dewan Kerjasama Teluk, pada akhirnya memperoleh hasil damai dengan adanya beberapa tanda damai dari pemerintah Qatar dengan mengusir beberapa pemimpin dari kelompok organisasi teroris yaitu Ikhwanul Muslimin. Keputusan dan langkah yang diambil Qatar tersebut ternyata mendapat respon dari negara-negara anggota GCC yang lain. Mereka menganggap keputusan Qatar sebagai itikat baik Qatar dalam upaya merevitalisasi hubungannya dengan negara-negara anggota GCC.

Hal ini juga membuktikan upaya Qatar dalam melaksanakan perjanjian keamanan yang telah disepakati. Hubungan negara-negara yang tergabung dalam GCC ini kembali membaik setelah Qatar meminta para eksil Ikhwanul Muslimin untuk meninggalkan negaranya pada September 2014. Hal ini dilakukan Qatar sebagai bentuk kesungguhan terhadap komitmen dalam pembangunan aliansi negara-negara Timur Tengah atau negara-negara yang tergabung dalam GCC. Kemudian, negara-negara yang sebelumnya menarik duta besar mereka dari Doha termasuk Arab Saudi pun mengirim kembali duta besar mereka ke negara tersebut.

Disamping membaiknya Qatar dengan Arab Saudi dan negara-negara anggota GCC lainnya, Qatar juga menarik duta besarnya dari Iran pada Januari 2016, hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap Arab Saudi. Qatar menjadi negara terbaru yang menarik duta besarnya dari Teheran, sebagai bentuk dukungan terhadap Arab Saudi dalam sengketa diplomatiknya dengan Iran. Langkah ini menyusul Kuwait, Uni Emirat Arab dan Yordania yang sudah memutus maupun mengurangi hubungan diplomatiknya dengan Iran, terkait eksekusi ulama Syiah, Nimr al-Nimr, oleh pemerintah Saudi. Keputusan ini diambil Qatar dalam

rangka menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi yang sempat memanas tiga tahun belakangan.<sup>19</sup>

Hubungan Arab Saudi dan Qatar ini mengalami intensitas yang naik turun. Dimana pada tahun 2017 lalu hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar kembali mengalami penurunan. Saudi akhirnya mengambil kebijakan untuk menghentikan hubungan diplomatik terhadap Qatar tepatnya 5 Juni 2017. Dunia internasional digemparkan dengan adanya kabar pemutusan hubungan diplomatik kedua negara ini. Keputusan untuk menghentikan hubungan diplomatik ini juga diikuti oleh lima negara Arab lainnya yang merupakan sekutu Arab Saudi di Timur Tengah, yaitu Yaman, Mesir, Bahrain, Libya dan Uni Emirat Arab.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Aljazeera, "more countries back Saudi Arabia in Iran dispute" diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2016/01/nations-saudi-arabia-row-iran-160106125405507.html> pada 11 November 2018

<sup>20</sup> Kumparan, "Infografis: Riwayat Hubungan Arab Saudi dan Qatar", diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/infografis-riwayat-hubungan-arab-saudi-dan-qatar> pada 11 November 2018